



Jurnal Yaqzhan, Vol. 11 No. 01, Juni 2025

Available online at

<http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v11i1.21496

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,
Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon, Indonesia

ANALISIS RELASI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN LANGKAT

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS TOWARD WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION IN 2024 IN LANGKAT REGENCY

Yuli Safitri¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

yuli4003243003@uinsu.ac.id

Mardian Idris Harahap²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ardianidris@uinsu.ac.id

Elly Warnisyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ellywarnisyah@uinsu.ac.id

ABSTRAK: Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan relasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini akan membatasi cakupan pada bagaimana status sosial ekonomi, yang mencakup pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan kekayaan, memengaruhi kesadaran politik dan perilaku pemilihan perempuan dalam konteks demokratisasi di Kabupaten Langkat. Subjek penelitian artikel ini adalah perempuan di Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena mendalam yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data di lapangan maupun studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan dan proses politik. Namun, masih terdapat variasi dan ketimpangan dalam partisipasi politik dan kesadaran perempuan yang perlu diatasi melalui strategi pembangunan yang inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan. Artikel ini sangat direkomendasikan untuk penggiat politi khususnya perempuan dan akademisi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Status Sosial Ekonomi; Partisipasi Politik Perempuan.

ABSTRAK: The primary focus of this study is to analyze and describe the relationship between socio-economic status and women's political participation in Langkat Regency. This research specifically examines how socio-economic status—comprising education, income level, and asset ownership—influences women's political awareness and voting behavior within the broader context of democratization in Langkat Regency. The subjects of this study are women residing in Langkat Regency. This research employs a qualitative method aimed at providing an in-depth explanation of the phenomenon by collecting field data as well as conducting literature reviews. The findings indicate that women in Langkat Regency are playing an increasingly significant role in development and political processes. However, disparities and inequalities in women's political participation and awareness still persist and must be addressed through inclusive development strategies that support women's empowerment. This article is highly recommended for political activists, particularly women, and academic scholars.

Keywords: Political Participation; Socio-Economic Status; Women's Political Participation.

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan politik. Warganegara dapat berpartisipasi dalam berbagai macam aktivitas politik sebagai manifestasi partisipasi politik di sebuah negara.¹ Karakteristik dari partisipasi politik idealnya bersifat sukarela, tanpa paksaan dan bukan dimobilisasi oleh negara maupun partai yang berkuasa. Partisipasi politik masyarakat merupakan bagian integral dari pemerintah agar pemerintah juga bisa memperhatikan atau mendukung aspirasi rakyat.²

Dalam pemilu, tingkat partisipasi pemilih adalah salah satu indikator penting tentang bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Status sosial ekonomi menekankan pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan dan pendapatan yang diperoleh.³ Status sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu bentuk klasifikasi di masyarakat berdasarkan beberapa indikator seperti tingkat pendidikan, kedudukan/posisi seseorang, pendapatan dan kepemilikan kekayaan.⁴ Oleh sebabnya, penghasilan atau pekerjaan tertentu dapat menentukan tinggi atau rendahnya status seseorang di masyarakat.

Dalam kehidupan politik, masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi umumnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu faktor seseorang ikut berperan aktif atau tidaknya dalam aktivitas politik adalah status sosial dan ekonomi.⁵ Tidak semua masyarakat memiliki status sosial ekonomi yang sama, baik dari tingkat pendidikan, pendapatan, maupun pekerjaan. Di satu sisi, ada masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dan baik, namun di sisi lain ada juga masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah dan buruk. Pola pikir yang terbentuk dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda menjadikan paradigma seseorang terhadap politik dapat berbeda-beda. Dalam proses partisipasi politik, status sosial ekonomi menjadi salah satu faktor yang bersifat ambivalen yang dapat mempercepat proses partisipasi politik seseorang, atau juga menghambat proses partisipasi politik seseorang.

¹ Syahril Syarbaini, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

² Tetu Tabuni, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014 (Suatu Studi Distrik Balingga)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3, no. 1 (2016).

³ Saparutdin Brutu, "Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024).

⁴ Muhammad Sultan Mubarak, *Filsafat Ekonomi Islam, Mitra Ilmu*, vol. 5, 2022.

⁵ Tabuni, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014 (Suatu Studi Distrik Balingga)."

Hubungan antara status sosial ekonomi dan partisipasi pemilih dapat dilihat dari mekanisme pola pemilih. Calon pemimpin yang ikut dalam kontestasi politik melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan kepada pemilih berupa barang/uang sebagai biaya transportasi di mana tujuannya agar pemilih tersebut datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya kepada calon pemimpin tersebut. Ironisnya, calon pemimpin yang menggunakan kekuatan uang (*money politics*)⁶ menasar pada kelompok masyarakat yang bersatus sosial ekonomi rendah, misalnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pendidikan rendah sebagai sasaran politik uang, karena pada dasarnya masyarakat bawah rata-rata tidak peduli terhadap pemilu dan lebih fokus pada kerja sehari-harinya.

Hal ini sesuai dengan pendekatan rasional yang berasumsi bahwa pemilih akan bertindak rasional dengan memberikan suara kepada calon yang memberi keuntungan sebesar-besarnya dan menekan kerugian sedikit mungkin. Pendekatan ini diambil dengan analogi antara pasar (ekonomi) dan partisipasi (politik).⁷ Warga yang bersatus pendidikan tinggi lebih banyak mengerti dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam bidang politik, karena cenderung memiliki wawasan sehingga sadar akan posisi dirinya sebagai warga negara terhadap pentingnya berpartisipasi pada kehidupan politik, meskipun partisipasinya tidak menjadi seorang pelaku dalam kegiatan politik, namun mereka secara sadar mengikuti kampanye dan datang ke tempat pemungutan suara, menggunakan hak suaranya, serta mengikuti kegiatan dalam perhitungan suara.

Lebih spesifik dalam partisipasi politik perempuan, relasi antara partisipasi politik dengan sosial ekonomi memiliki pola yang sama. Dalam negara yang demokratis dan inklusif, pemilih perempuan menjadi salah satu representasi bahwa perempuan juga harus memiliki kesadaran politik yang tinggi. Peran perempuan di era modern merupakan *stakeholder* dari pembangunan peradaban, termasuk pembangunan politik yang demokratis.⁸ Oleh sebab itu untuk memajukan pembangunan peradaban harus menekankan pentingnya upaya dalam partisipasi perempuan dalam kehidupan politik.

⁶ Politik uang, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*money politics*", adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik pemberian atau janji imbalan (uang, barang, atau jasa) kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam suatu pemilihan

⁷ Albi Ikhzami dan Dodi Jaya Wardana, "The Effect Money Politic on the Level of Voter Participation Elections in Indonesian," *Daulat Hukum* 7, no. 4 (2024).

⁸ Indra Gunawan, Ahmad Khaerurozi, dan Syamsul Maarif, "Persepsi Mahasiswa Mengenai Isu Kesenjangan Gender dalam Mempelajari Bidang Filsafat," *Equalita: Pusat Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2021).

Sebab mereka harus mampu memengaruhi kebijakan yang mengarah pada keadilan untuk perempuan. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pemilih perempuan dalam pemilihan apakah masih bisa dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fenomena di atas dapat direpresentasikan bahwa status sosial ekonomi tinggi dan rendah sama-sama memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Namun cara yang ditempuh berbeda di mana status sosial ekonomi yang tinggi mampu mengikuti pemilihan dengan cara yang benar. Sedangkan status sosial yang rendah mengarah pada praktek pelanggaran pada saat melakukan partisipasi politik dalam memilih.

Kabupaten Langkat memiliki beberapa permasalahan terkait dengan kesejahteraan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat stabil di angka sekitar 5 persen sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, namun secara umum masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis karena masa pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat dalam *trend* 5 tahun 2014-2018 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi dalam PDRB, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berbeda dengan kondisi di Provinsi Sumatera Utara, dimana laju pertumbuhan sektor yang memiliki kontribusi tinggi, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, tidak mengalami penurunan signifikan dan diiringi dengan peningkatan pada sektor ekonomi lainnya terutama sektor ekonomi tersier seperti perdagangan dan jasa.

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat kembali meningkat yakni tumbuh 5.07%. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,71 % dan tahun 2016 sebesar 3,62%. Meskipun laju pertumbuhan sektor tersebut meningkat pada tahun 2017, namun kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Langkat semakin menurun tanpa diiringi dengan peningkatan yang signifikan dari sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2014 hingga 2018, garis kemiskinan pada Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin meningkat selama tahun 2014-2016, dan kembali menurun pada tahun 2017 hingga 2020.

Berikut pemaparannya: Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.⁹

Pada periode 2014-2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun pada tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016 untuk kemudian meningkat tahun 2018. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,22 pada tahun 2014 menjadi 1,68 pada tahun 2018. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,26 pada tahun 2014 menjadi 0,41 pada tahun 2018. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada penurunan pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauhi garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga menjadi semakin besar.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di sekitar dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat memiliki angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional, Provinsi Sumatera Utara, maupun kabupaten/kota lainnya di sekitar. Pada tahun 2020, kemiskinan di Kabupaten Langkat memiliki angka sebesar 9,73% sedangkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,75%. Jumlah penduduk Langkat tahun 2020 diperkirakan mencapai 1.030.202 jiwa terdiri dari 520.784 jiwa laki – laki dan perempuan sebanyak 509.418 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat terus meningkat dari tahun 2016 – 2019, namun menurun pada tahun 2020. Rata-rata laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat periode 2010-2018 ialah sebesar 0,88% untuk penduduk laki-laki dan 0,90% untuk penduduk perempuan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dari pertumbuhan penduduk laki-laki.

Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk perempuan semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu partisipasi pemilihan perempuan menjadi salah satu agenda penting di mana hal tersebut memberikan dampak

⁹ BPS Langkat 2014 – 2024.

kepada perempuan dalam memilih pemimpin kedepannya¹⁰. Merujuk pada ayat Al-Quran surah Al Hujarat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Demi memperkuat peran perempuan dalam melakukan pemilihan dapat merujuk pada kitab hadist Tafsir al-Sya^hrâwi di bawah ini:

الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة ، هي قضية المساواة بين الرجل والمرأة

Artinya, “Allah Al-Haqq tabaraka wa ta'ala memberi kita (manusia) suatu prinsip universal yaitu ketentuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (As-Sya'rawi, Tafsirus Syar'awi, Merujuk penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli As-Syar'awi (wafat 1998), pakar tafsir Al-Qur'an asal Mesir, maksud hadis adalah Allah SWT memberi manusia prinsip universal, yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح

Masih dalam penafsiran Syekh Mutawalli As-Syar'awi, maksud amal saleh dalam ayat adalah segala hal yang menunjang kehidupan manusia. Artinya, “Segala sesuatu yang menolong pergerakan kehidupan adalah amal saleh.¹²

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga berupaya untuk mengintegrasikannya dengan keislaman, dengan merujuk pada Ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁰ Al-Qur'an surah Al Hujurat ayat 13 “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”

¹¹ hadist Tafsir al-Sya^hrâwi

¹² merujuk penafsiran Syekh Mutawalli As-Syar'awi كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح

Artinya, “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syai menjelaskan makna dari QS An Nahl ayat 97 yakni, “Barangsiapa beramal saleh sesuai dengan syariat, laki-laki atau wanita, dia beriman kepada Allah, niscaya Kami akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan (membuatnya) rida terhadap ketetapan Allah, kanaah dan bimbingan menuju ketaatan. Kami pasti akan membalas mereka di Akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka lakukan di dunia.¹³

Pada Ayat Al-Quran surah Annisa ayat 32 Allah juga berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^١ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^٢ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^٣ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan makna dari QS Annisa ayat 32 yakni, “Janganlah kalian berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Tentu amal saleh di sini juga bersifat umum, baik amal saleh yang bersifat kebajikan, bersifat privat maupun amal saleh yang bersifat publik dan menyangkut urusan orang banyak seperti halnya aktivitas dalam dunia politik praktis. Baik sebagai pemilih

¹³ QS An Nahl ayat 97 yakni, “Barangsiapa beramal saleh sesuai dengan syariat, laki-laki atau wanita, dia beriman kepada Allah, niscaya Kami akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan (membuatnya) rida terhadap ketetapan Allah, kanaah dan bimbingan menuju ketaatan. Kami pasti akan membalas mereka di Akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka lakukan di dunia”

maupun orang yang dipilih dalam kontestasi politik di alam demokrasi seperti Indonesia. Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syai menjelaskan makna dari QS An Nahl ayat 97 yakni, “Barangsiapa beramal saleh sesuai dengan syariat, laki-laki atau wanita, dia beriman kepada Allah, niscaya Kami akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan (membuatnya) rida terhadap ketetapan Allah, kanaanah dan bimbingan menuju ketaatan. Kami pasti akan membalas mereka di Akhirat

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik meneliti relasi status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik perempuan tahun 2024 di Kabupaten Langkat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti, yaitu bagaimana status sosial ekonomi memengaruhi partisipasi politik perempuan. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data, seperti yang dijelaskan oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln dalam buku "*Strategies of Qualitative Inquiry*"

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan relasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini akan membatasi cakupan pada bagaimana status sosial ekonomi, yang mencakup pendidikan, pendapatan, dan pemilikan kekayaan, memengaruhi kesadaran politik dan perilaku pemilihan perempuan dalam konteks demokratisasi di Kabupaten Langkat.

Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, karena tempat ini memiliki karakteristik yang relevan untuk diteliti, yaitu adanya dinamika partisipasi politik perempuan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Pemilihan lokasi ini didukung oleh ketersediaan data dan fenomena yang dapat diukur dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam dengan perempuan yang terlibat dalam pemilihan pemilu dan tim sukses yang memiliki pemahaman tentang pola pemilih perempuan di Kabupaten Langkat. Wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan panduan

wawancara yang telah dirancang untuk memastikan komprehensivitas dan konsistensi data yang dikumpulkan.

2. Dokumentasi data partisipasi perempuan dalam pemilihan pemilu dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi ini akan mencakup laporan pemilu, statistik sosial ekonomi, dan laporan kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi politik perempuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perempuan dan Partisipasi Politik

Perwakilan politik berarti bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan anggota masyarakat¹⁴. Berdasarkan pengertian di atas menjelaskan bahwa perwakilan politik menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.¹⁴

Partisipasi massa dan kerlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini, bisa bercorak demokratis atau totaliter. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang menjadi warga Negara ikut aktif dalam proses politik. Pembangunan di lain pihak dapat diartikan sebagai kemajuan kearah tujuan yang lebih luas, atau kemajuan ke arah yang ditentukan oleh agen, atau oleh diri sendiri. Langkah-langkah pembangunan politik akan memengaruhi pula perkembangan sistem-sistem politik yang beralaku di berbagai Negara.¹⁵

Ciri-ciri sistem politik yang maju ada pada masyarakat pada masyarakat modern, sedangkan ciri-ciri sistem politik tidak maju ada pada masyarakat tradisional.¹⁶ Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, memengaruhi partisipasi politik perempuan. Misalnya, peningkatan pendapatan perempuan dan pendidikan dapat meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.¹⁷

¹⁴ "perwakilan politik menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan"

¹⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).

¹⁶ Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik* (Yogyakarta: Gading, 2013).

¹⁷ Katimin, Sahrin dan Sipahutar 2024, *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam Dan Kristen* Studia Sosia Religia 7 (1), 1-14,2024

Perempuan dengan tingkat kepercayaan sosial yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam politik,¹⁸ karena mereka percaya bahwa partisipasi mereka akan membuat perbedaan dan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.¹⁹ Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor.²⁰

2. Partisipasi Politik Penduduk Perempuan Di Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Langkat

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik penduduk perempuan di pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Langkat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting:

a. Kesadaran Politik:

Dokumen RPJMD menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah telah meningkat dari tahun 2014 hingga 2018, baik dalam jumlah maupun prosentase. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat

¹⁸ Muhammad Awaluddin Iqbal, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 827–836.

¹⁹ Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, *Islam di Asia Selatan, Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh* (Bandung: Humaniora, 2006).

²⁰ Putnam, 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ : Princeton University Press

semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam proses politik dan pemerintahan.²¹

Penelitian menemukan bahwa kesadaran politik perempuan sangat bervariasi, dengan perempuan yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran politik yang menyatakan bahwa pengalaman sosial dan ekonomi memengaruhi kesadaran politik seseorang.

b. Keterlibatan dalam Proses Pemilihan:

Data dari RPJMD menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran yang semakin penting dalam angkatan kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan sangat bervariasi, dengan perempuan yang memiliki pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan dan pendapatan memengaruhi keterlibatan seseorang dalam proses politik.

c. Pengaruh dalam Pembuatan Kebijakan:

Meskipun dokumen RPJMD tidak menyebutkan secara spesifik pengaruh perempuan dalam pembuatan kebijakan, peningkatan jumlah perempuan di eselon pemerintahan menunjukkan potensi pengaruh yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dirumuskan.

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori keterwakilan politik yang menyatakan bahwa keterwakilan yang efektif memerlukan partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan.

²¹ RPJMD Langkat 2024

d. Strategi Pembangunan:

RPJMD menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat diharuskan untuk berperan aktif dalam strategi pembangunan daerah.²²

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam strategi pembangunan dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan data yang disajikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024 dan hasil penelitian yang disebutkan, kita dapat menggabungkan informasi tersebut untuk memahami peran perempuan di Kabupaten Langkat dalam proses politik dan pembangunan.

e. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018, baik dalam jumlah maupun prosentase. Ini menunjukkan bahwa perempuan semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam proses politik dan pemerintahan.

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terhadap perempuan yang bekerja menunjukkan fluktuasi cenderung menurun, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian perempuan yang bekerja memilih untuk bekerja di sektor swasta.

Di sektor swasta, partisipasi perempuan juga menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Prosentase perempuan yang bekerja di sektor non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) meningkat dari 96,08% pada tahun 2014 menjadi 96,67% pada tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memilih untuk berkarier di sektor swasta, baik karena peluang

²² RPJMD menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat diharuskan untuk berperan aktif dalam strategi pembangunan daerah.

yang lebih luas, fleksibilitas kerja, atau insentif ekonomi yang lebih menarik dibandingkan dengan sektor publik.

Secara keseluruhan, data dari RPJMD menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Kabupaten Langkat dalam lembaga pemerintah dan angkatan kerja secara umum mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat variasi dan ketimpangan dalam partisipasi politik dan kesadaran perempuan yang perlu diatasi. Misalnya, meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, jumlahnya masih tidak sebanding dengan total populasi perempuan yang bekerja. Selain itu, peran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Berdasarkan data yang disajikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tercatat sebesar 58,29%, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 64,02% pada tahun 2018. Peningkatan ini mencerminkan adanya usaha dan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan, menunjukkan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender di sektor publik.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi pembangunan yang inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program-program beasiswa, pelatihan vokasional, dan pendidikan lanjutan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi perempuan, sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar kerja dan berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan ekonomi.²³

Selain itu, penting juga untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan. Ini termasuk mengubah norma sosial dan budaya yang mendiskriminasi perempuan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga, serta menyediakan

²³ RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024

fasilitas pendukung seperti penitipan anak dan cuti melahirkan yang memadai. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, perempuan akan lebih mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, data dari RPJMD dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan dan proses politik. Namun, masih terdapat variasi dan ketimpangan dalam partisipasi politik dan kesadaran perempuan yang perlu diatasi melalui strategi pembangunan yang inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan.²⁴

3. Relasi Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Tahun 2024 Di Kabupaten Langkat

Berdasarkan data yang disajikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024 dan hasil penelitian terkait, kita dapat memahami bagaimana status sosial ekonomi memengaruhi partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat secara komprehensif. Kesadaran politik perempuan di Kabupaten Langkat menunjukkan peningkatan yang signifikan menurut dokumen RPJMD. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat dari tahun 2014 hingga 2018, mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam proses politik dan pemerintahan. Penelitian juga mengindikasikan bahwa kesadaran politik perempuan berkorelasi dengan status sosial ekonomi mereka, di mana perempuan dengan status yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi, sesuai dengan teori kesadaran politik.

Dalam konteks keterlibatan dalam proses pemilihan, data dari RPJMD menunjukkan bahwa metode memiliki peran yang semakin penting dalam angkatan kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.²⁵ Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan masih bervariasi, terutama terkait

²⁴ RPJMD Langkat

²⁵ RPJMD Langkat

dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Perempuan dengan pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam proses pemilihan, mencerminkan teori partisipasi politik yang menekankan peran faktor-faktor sosio-ekonomi dalam keterlibatan politik.

Pengaruh perempuan dalam pembuatan kebijakan di Kabupaten Langkat, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam RPJMD, didorong oleh peningkatan jumlah perempuan di eselon pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan lokal. Penelitian menguatkan bahwa perempuan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan, sesuai dengan teori keterwakilan politik. Strategi pembangunan daerah, seperti yang ditekankan dalam RPJMD Kabupaten Langkat, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat diharapkan untuk berperan aktif dalam strategi pembangunan lokal. Penelitian menegaskan bahwa perempuan berperan penting dalam strategi pembangunan dan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pembangunan, sesuai dengan teori pembangunan partisipatif.²⁶

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat pada pemilihan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran politik, keterlibatan dalam proses pemilihan, pengaruh dalam pembuatan kebijakan, dan peran dalam strategi pembangunan. Variasi dalam partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas demokrasi dan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, data dari RPJMD dan hasil penelitian menggambarkan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran yang semakin signifikan dalam proses politik dan pembangunan. Namun, masih ada tantangan dalam mengatasi variasi dan ketimpangan dalam partisipasi politik serta kesadaran perempuan. Strategi pembangunan yang inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan harus terus

²⁶ Perempuan berperan penting dalam strategi pembangunan dan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pembangunan, sesuai dengan teori pembangunan partisipatif

ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dan memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah mereka.²⁷

4. Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Langkat

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang status sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Langkat, sebuah wilayah yang menunjukkan tingkat variasi yang signifikan yang dipengaruhi oleh beragam faktor kunci. Dalam analisis mendalam yang dilakukan melalui wawancara serta studi dokumentasi, status sosial ekonomi di daerah ini teridentifikasi dalam tiga kategori utama, yaitu *ascribed status*, *achieved status*, dan *assigned status*. Kajian ini tidak hanya menyoro kondisi saat ini tetapi juga merujuk pada data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat periode 2019-2024 guna merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif terkait aspek sosial ekonomi yang tengah berkembang di wilayah tersebut.²⁸

RPJMD Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa pendidikan dan kesempatan kerja menjadi faktor penting dalam mencapai *achieved status*. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang masih rendah dan kesempatan kerja yang terbatas menjadi hambatan utama bagi mobilitas sosial di wilayah ini. Pada tahun 2018, tingkat pendidikan di Kabupaten Langkat masih berada di bawah rata-rata nasional, yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini berdampak pada kemampuan individu untuk meningkatkan *achieved status* mereka, sehingga banyak penduduk yang terjebak dalam status sosial ekonomi yang rendah.²⁹

Pendapatan harian, bulanan, dan tahunan merupakan indikator utama dari status ekonomi individu atau keluarga. Di Kabupaten Langkat, pendapatan ini dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan, dengan variasi yang signifikan dalam tingkat pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Teori klasifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber³⁰ menyatakan bahwa status ekonomi dapat diukur melalui pendapatan dan kepemilikan aset. Dalam konteks ini,

²⁷ RPJMD Langkat

²⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat periode 2019-2024

²⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat periode 2019-2024

³⁰ Ahmad Putra, "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber," *Al-Adyan* 1, no. 1 (2020): 39–51.

pendapatan tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai penanda kelas sosial dalam masyarakat. Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya memainkan peran penting dalam menentukan variasi pendapatan di Kabupaten Langkat.³¹

D. SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat. Hasil temuan dari penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang dinamika sosial dan politik yang ada di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini juga memberikan landasan yang kuat untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu pemerintah lokal dan partai politik dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dengan memahami secara mendalam dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sensitif gender dan berdaya guna.

Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar yang solid untuk mendukung program pendidikan politik dan advokasi. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses politik. Dengan memperkuat pengetahuan politik dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam forum politik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh warga masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan hasil empiris, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan dalam memperkuat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat dan konteks yang lebih luas di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil berdasarkan temuan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dalam membangun tatanan politik yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga.

³¹ Teori klasifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1922 menyatakan bahwa status ekonomi dapat diukur melalui pendapatan dan kepemilikan aset

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin van. *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*. Yogyakarta: Gading, 2013.
- Brutu, Saparutdin. "Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Gunawan, Indra, Ahmad Khaerurozi, dan Syamsul Maarif. "Persepsi Mahasiswa Mengenai Isu Kesetaraan Gender dalam Mempelajari Bidang Filsafat." *Equalita: Pusat Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2021).
- Ikhzami, Albi, dan Dodi Jaya Wardana. "The Effect Money Politic on the Level of Voter Participation Elections in Indonesian." *Daulat Hukum* 7, no. 4 (2024).
- Iqbal, Muhammad Awaluddin. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 827–836.
- Katimin, Sahrin dan Sipahutar. "Kepemimpinan Wanita Dalam Islam Dan Kristen." *Studia Sosia Religia* 7, no.1 (2024).
- Mubarok, Muhammad Sultan. *Filsafat Ekonomi Islam. Mitra Ilmu*. Vol. 5, 2022.
- Putra, Ahmad. "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber." *Al-AdYan* 1, no. 1 (2020): 39–51.
- Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1993.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat periode 2019-2024.
- Syarbaini, Syahrial. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tabuni, Tetu. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014 (Suatu Studi Distrik Balingga)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3, no. 1 (2016).
- Thohir, Ajid, dan Ading Kusdiana. *Islam di Asia Selatan, Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh*. Bandung: Humaniora, 2006.